

**TERORISME DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA:
KAJIAN ATAS KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Bidang Ilmu Sosial**

OLEH:

**INSAN KAMIL
00540196**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Dr. H. Siswanto Masruri, MA.
Ustadi Hamzah, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Insan Kamil

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Insan Kamil
NIM : 00540196
Judul : Terorisme di Indonesia dan Penanggulangannya: Kajian Atas Kebijakan Politik Pemerintah RI

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu sosial, fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

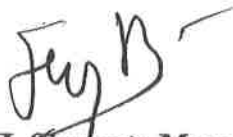
Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1428H
27 Agustus 2007

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Siswanto Masruri, MA.
NIP. 150216328



Ustadi Hamzah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150298987



PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1243/2007

Skripsi dengan judul: *TERORISME DI INDONESIA DAN
PENANGGULANGANNYA: Kajian atas
Kebijakan Politik Pemerintah RI*

Diajukan oleh :

1. Nama : Insan Kamil
2. NIM : 0054 0196
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : SA

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Senin, tanggal: 10 September 2007 dengan nilai: B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Dr. Sekar Ayu Aryani, MA
NIP. 150 232692

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA
NIP. 150 216 328

Penguji I

Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA
NIP. 150 182 860

Sekretaris Sidang

Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi
NIP. 150 301 493

Pembimbing II

Ustadhi Hamzah, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 298 987

Penguji II

Munawar Ahmad, SS., M.Si
NIP. 150 321 646



Yogyakarta, 10 September 2007
DEKAN

Drs. H. M. Fahmi, M. Hum
NIP. 150 088 748

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang dengan segala petunjuk dan pertolongannya telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat Allah pula, walaupun dengan susah payah peneliti akhirnya sanggup melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Sang Kekasih Allah Muhammad rasullah. Semoga kelak kita berada dalam barisannya. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah ikhlas membantu, baik berupa dorongan moral, pikiran serta masukan dan pengesahan-pengesahan yang sangat penting. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. Fahmi Muqaddas, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. Muhammad Damami, M.Ag., selaku penasehat akademik peneliti
3. Bapak Muhammad Soehadha, M.Hum, selaku ketua Prodi Sosiologi Agama
4. Bapak. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA., dan Bapak Ustadi Hamzah, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing yang dengan tekun, sabar, dan bijaksana

mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). Bersama kalianlah peneliti mengerti bahwa hidup harus selalu berpihak kepada mereka yang dilemahkan. Bersama kalian pula peneliti mencoba berjuang dan bertahan dalam rentang sejarah.
7. Kawan-kawan FS-KMMJ dan KSPM semoga apa yang kita lakukan meninggalkan jejak bagi para penerus. Bersama kita pernah mengurai mimpi, walau sekarang kita mengambil jalan berbeda.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SAW dengan kebaikan yang berlipat ganda. Peneliti sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Di sana- sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritik akan sangat berharga bagi peneliti. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1428H
27 Agustus 2007 M

Insan Kamil
00540196

Motto :

**"Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan
Suatu Kaum, Hingga ia Mengubahnya dengan
Kekuatannya Sendiri".**

"Rakyat Kuasa, Allah Maha Kuasa!"



SKRIPSI INI

KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGA KECILKU:

ISTRIKU LULUK KHUMAIDAH

PERMATA KECILKU NING RATIH NEDIFA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik diatas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	ze dengan titik diatas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ^ˆ	fathah	a	A
----- _ˆ	kasrah	i	I
----- ^ˆ _ˆ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a-i
و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa* حول → *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

3. Ta Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة لعطفال → *raudatul aṭfal* atau *muḍah al-aṭfal*
المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-madīnatul al-Munawwarah*
طلحة → *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل → *nazzala*

البر → *al-birr*

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa mā Muhammadun illā rāsūl*

ABSTRAK

Terorisme adalah masalah yang pelik dan kompleks. Karena mengandung makna yang peyoratif, istilah terorisme acapkali disalahtafsirkan dan dipolitisasi. Pada dasarnya terorisme menunjuk kepada penggunaan kekerasan (*political violence*) untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Baik itu terorisme negara (*state terrorism*) maupun terorisme agama (*religious terrorism*). Penelitian ini difokuskan kepada fenomena terorisme yang diperankan oleh kelompok-kelompok agama.

Terorisme telah menjadi fakta yang mengejutkan masyarakat internasional. Diawal abad ini, akasi "terorisme" telah menghancurkan WTC dan sebagian Pentagon. Di Indonesia, aksi "terorisme" serupa juga terjadi. Aksi "terorisme" yang paling mengagetkan dan menyedihkan adalah tragedi 12 Oktober 2002. Sejak tragedi tersebut, secara beruntun, aksi-aksi terorisme, berupa pengeboman kerap terjadi. Berpuncak pada bom bunuh diri pada 1 Oktober 2005 di Bali. Faktor kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*), dan kesenjangan (*inequality*) oleh sebagian kalangan diyakini sebagai akar persoalan (*root problems*) terorisme.

Terorisme di Indonesia mempunyai motif-motif tertentu. Motif-motif tersebut terkait erat dengan situasi ekonomi politik Indonesia dan dunia. Terorisme, termasuk yang terjadi di Indonesia harus dilihat dalam konteks kompetisi ekonomi politik global, yang mana kompetisi itu menyebabkan penderitaan dan ekses buruk kepada sebagian orang. Ekses ini juga mengenai umat Islam, terutama di Timur Tengah. Keadaan serba buruk, ketertindasan, dan ketidakpastian, menyebabkan sebagian kalangan muslim mengambil jalan kepastiannya sendiri melalui jalan terorisme. Dari peta ini, kemudian dapat dilacak motif-motif terorisme di Indonesia, yaitu motif politik, motif agama, dan motif ideologis. Pemerintah Indonesia, sebagai pemegang kewenangan politik, segera mengambil langkah-langkah politik yang dimaksudkan untuk menghambat dan menanggulangi terorisme.

Kebijakan politik pemerintah Indonesia tentang penanggulangan terorisme terkesan mengedepankan aspek kontraterorisme daripada aspek antiterorisme yang sebenarnya lebih menyentuh akar persoalan terorisme. Kebijakan tersebut meliputi penerbitan undang-undang, pengaktifan aparat kepolisian dan intelijen, dan kerjasama luar negeri. Untuk menganalisa hal di atas, peneliti menggunakan teori tindakan sosial dan teori sosiologi politik. Teori tindakan sosial terutama digunakan untuk menganalisa motif-motif terorisme dengan sekian pembenaran dan tujuan-tujuannya. Sementara teori sosiologi politik lebih digunakan untuk menganalisa distribusi kekuasaan dan kewenangan antarlembaga negara dalam penanggulangan terorisme. Namun secara bersamaan teori ini juga digunakan untuk melihat motif terorisme.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TERORISME DI INDONESIA: OBSERVASI AWAL

A. Sejarah dan Definisi Terorisme	20
B. Terorisme dan Islam Radikal di Indonesia	23
C. Motif-Motif Terorisme di Indonesia	32
1. Motif Politik	34
2. Motif Agama	36
3. Motif Ideologis	39

BAB III KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI TENTANG TERORISME

A. Relasi Terorisme dengan Konfigurasi Politik Nasional Indonesia ...	44
B. Kebijakan Politik Pemerintah Indonesia Tentang Terorisme.....	53
1. Pemberlakuan UU No. 15/2003	55
2. Pembentukan Densus 88 Anti Teror.....	58
3. Pembentukan Dekas Anti Teror.....	61
4. Pengaktifan Komando Teritorial TNI.....	62
5. Peningkatan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri	65

BAB IV ANALISIS

A. Islam dan Terorisme di Indonesia	69
B. Terorisme dan Politik Indonesia.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
C. Daftar Pustaka	79

LAMPIRAN

D. PETA GERAKAN NIL.....	
E. CURRICULUM VITAE.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah suatu istilah yang mengandung kekaburan dan sering disalah tafsirkan. Apalagi, bila terorisme dihubungkan dengan ideologi politik tertentu. Upaya untuk mendefinisikan istilah terorisme biasanya didasarkan atas asumsi, bahwa setiap tindakan kekerasan, terutama kekerasan politik (*political violence*) adalah *justifiable* dan kekerasan yang lain adalah *unjustifiable*. Kekerasan bentuk kedua ini yang tergolong teror.¹

Istilah terorisme, teroris dan teror telah menjadi wacana publik semenjak 11 september 2001 dengan runtuhnya dua menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York dan Pentagon di Washington. Peristiwa ini sangat mengerikan dan menghentakakan dunia. WTC dan Pentagon sebagai simbol perekonomian dan pertahanan Amerika Serikat runtuh dalam serangan dahsyat tersebut.

Osama bin Laden² dengan jaringan *Al-Qaeda* satu-satunya yang tertuduh dan harus bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Kesimpulan ini diyakini oleh pemerintah Amerika Serikat tanpa mengikutsertakan bukti-

¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.143.

² Osama dilahirkan di Arab Saudi pada tahun 1957. Dia anak seorang kontraktor kaya raya berkebangsaan Arab. Saat pecah perang Afganistan (1979-1989) dia menjadi sukarelawan di bidang logistik. Dia juga pernah dididik di agen resmi Amerika Serikat (CIA) di bawah bimbingan Mike Schuer. Aksi "terorisme" yang diduga didalangi Osama bin Laden versi Amerika Serikat adalah pengeboman WTC 26 Februari 1993, bom mobil di Arab Saudi 13 Nopember 1995, bom mobil di komplek marinir AS, 25 Juni 1996, bom di Kedutaan AS di Kenya dan Tanzania 7 Agustus 1998, dan bom bunih diri di kapal perusak USS Cole di pelabuhan Yaman pada 12 Oktober 2000. Lihat *Tempo*, 17-23 September 2001, hlm. 142.

Dunia dipaksa memilih antara “carrot” atau “stick”. Negara yang membantu Amerika dalam perang melawan terorisme akan diberi bantuan, adapun Negara yang enggan tunduk terhadap keinginan Amerika akan digebuk dan dituduh teroris.³ Rezim yang tidak mau melawan terorisme akan dicap sebagai rezim jahad (*hostile regime*).

Di Indonesia, pemerintahan Megawati Soekarno Putri langsung bergabung dengan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat dalam pemberantasan terorisme. Karena mau menuruti kemauan Amerika Serikat untuk melawan terorisme, Indonesia diberi hadiah berupa pencabutan embargo militer dan bantuan senilai 400 dolar Amerika.⁴ Kebijakan politik pemerintah Megawati ini- dilanjutkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono- ternyata membuat kecewa sebagian umat Islam Indonesia.

Tahun Kedua dari pemerintahan Mega, publik Indonesia dikejutkan oleh aksi-aksi pengeboman diberbagai wilayah Indonesia yang dimotivasi kebencian terhadap Barat dan Amerika Serikat. Aksi pengeboman yang paling dahsyat dan banyak menelan korban terjadi di Legian, Kuta Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002.⁵ Serangan di Sari Club dan Paddy’s Bar itu menewaskan

³ Negara-negara Muslim tertentu yang oleh Amerika Serikat dituding sebagai pendukung terorisme adalah; Irak, Somalia, Sudan, Suriah dan Iran. Adapun kelompok-kelompok organisasi Islam seperti Islamic Jihad, Hamas, dan Hisbullah dinyatakan sebagai sasaran perang melawan terorisme. Amerika Juga mengumumkan Negara-negara non-Muslim seperti Kuba dan Korea Utara sebagai Negara teroris. Lihat Chandra Muzaffar, *Muslim, Dialog dan Teror* (Jakarta: Profetik, 2003), hlm. 187.

⁴ Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. ix

⁵ Bom Bali I ini dilakukan oleh Amrozi, Ali Gufran dan Imam Samudra. Dua yang pertama adalah warga Lamongan Jatim. Yang disebut terakhir berasal dari Banten. Ketiganya adalah alumnus perang Afghanistan.

12 Oktober 2002.⁵ Serangan di Sari Club dan Paddy's Bar itu menewaskan 202 orang⁶ dari 22 Negara. Kebanyakan korban tewas adalah warga Negara Australia dan warga Negara Indonesia.⁷ Peristiwa pengeboman Bali 12 Oktober 2002 ini menjadi titik awal dari serangkaian aksi-aksi pengeboman di sebagian wilayah Indonesia sampai pada aksi bom bunuh diri⁸ di R.Aja's Café Jimbaran, Kuta Bali pada tanggal 1 Oktober 2005.

Ledakan yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2002 di Mal Ratu Indah Makasar, tanggal 27 April 2003 di Bandar Udara Soekarna-Hatta, tanggal 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriott yang menewaskan 13 orang hingga ledakan di depan kedutaan Australia pada tanggal 9 September 2004 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Indonesia.

Dalam usaha memulihkan kondisi paska bom Bali I pemerintah Indonesia menerbitkan Perpu No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Perpu No. 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 pada peristiwa peledakan bom di Bali. Perpu No 1 dan 2 tahun 2002 ini kemudian pada tanggal 6 Maret 2003 disahkan menjadi UU No.15/2003.

⁵ Bom Bali I ini dilakukan oleh Amrozi, Ali Gufran dan Imam Samudra. Dua yang pertama adalah warga Lamongan Jatim. Yang disebut terakhir berasal dari Banten. Ketiganya adalah alumnus perang Afghanistan.

⁶ Angka ini berbeda dengan yang ditetapkan harian *Kompas*, tanggal 3 Oktober 2005. Di harian ini korban tewas sebanyak 196 orang.

⁷ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Terj), Satrio Wahono dkk (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 677.

⁸ Berdasar berita-berita yang dihimpun dari harian *Kompas*, bom bunuh diri menjadi trend dari aksi pengeboman di Indonesia sejak ledakan di Hotel JW Marriott dan di depan kedutaan Australia. Adalah Asmar Latin Sani, pria asal Bengkulu yang belakangan diketahui sebagai pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Heri Kurniawan atau Heri Golun sebagai pelaku bom bunuh diri di depan kedutaan Australia. Sementara tiga pelaku bom bunuh diri Bali II adalah Misno alias Wisno (30) dari Cilacap Jawa Tengah, Moh. Salik Firdaus dari Majalengka Jabar dan Ayib Hidayatullah (21) warga Ciamis Jabar. Lihat *Kompas*, tanggal 11 November dan 20 November 2005, hlm 15 dan 2.

Perpu ini oleh pemerintah Indonesia secara politis dijadikan payung hukum dalam usaha menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk luar negeri untuk memberantas terorisme.

Terorisme dan bom bunuh diri di Indonesia menjadi polemik dan mengundang wacana. Tak kurang dari tokoh agama, pakar politik, pejabat militer, Polri, cendekiawan, politisi dan tokoh-tokoh LSM angkat bicara tentang terorisme. Dari forum mahasiswa di kampus sampai pada konferensi internasional diadakan untuk mencari definisi terorisme dan latar belakang politik yang memotivasinya.

Ada anggapan bahwa agama sering menjadi bahan amunisi dalam setiap aksi terorisme. Hipotesa ini menjadi keyakinan sebagian umat manusia. Semangat keagamaan yang dicerminkan dalam wujud mencari kesyahidan (*isytyshad*) atau kemartiran dapat dibenarkan dalam agama. Sejarah dunia menunjukkan bahwa agama-agama dunia dari rumpun Ibrahim maupun yang bukan, memberikan justifikasi bahkan memotivasi tindakan-tindakan teror.

Kekerasan yang dilandasi oleh semangat keagamaan dan dimaksudkan untuk menebarkan rasa takut dan khawatir kepada orang lain atau kelompok tertentu oleh Mark Juergensmeyer dinamakan terorisme agama (*religious terrorism*).⁹ Konsep terorisme agama berbeda dengan teror yang dilakukan oleh negara (*state terrorism*).

Ketika agama menjadi justifikasi tindakan-tindakan teror, apakah hal ini dapat digunakan untuk tujuan-tujuan politik? Pertanyaan ini tidak gampang

⁹ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para pembela Agama* (Terj), Amien Rozany Pane (Yogyakarta: Tarawang Press, 2003), hlm. 5-6.

dijawab, dikarenakan terorisme mengandung kompleksitas dalam dirinya. Ia terkait dengan berbagai ragam ideologi politik dunia yang mengitarinya. Azyumardi Azra melihat kompleksitas radikalisme dan terorisme bersifat internal dan eksternal.¹⁰

Semua peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Hotel JW. Marriott dan Kedubes Australia serta ledakan bom yang terjadi di tempat lain, menjadi babakan baru dari wajah politik Indonesia. Negeri yang terkenal ramah, aman dan beradab, serta merta pupus akibat tindakan kekerasan terorisme.¹¹ Oleh kalangan internasional Indonesia dinyatakan sebagai salah satu sarang dari terorisme di Asia Tenggara.

Kenyataan ini perlu disikapi secara hati-hati oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Hal tersebut penting dilakukan agar dalam usaha penanggulangan terorisme sedapat mungkin menghindari ekses buruk yang diakibatkannya. Situasi nasional, regional dan internasional merupakan arena

¹⁰ Azyumardi Azra, "Gerakan Islam Militan di Asia Tenggara: Identitas atau Tantangan", *Jurnal CSIS*, XXXIII, Maret 2004, hlm. 96-97.

¹¹ Peneliti akan menjelaskan definisi terorisme pada bab II. Definisi didasarkan pada pandangan para ahli tentang terorisme. Walau demikian, peneliti tidak hanya menguraikan penjelasan teoritik semata, melainkan juga mencoba memberikan penjelasan yang lebih operasional tentang terorisme. Dalam arti yang lebih operasional terorisme adalah gerakan politik yang selalu melibatkan jaringan sel-sel gerakan, ideolog, pelaksana lapangan, sumber pendanaan, logistik, dan persenjataan. Strategi dan taktik adalah elemen terpenting dalam terorisme. Gerakan terorisme selalu bersifat klandestien. Terorisme hanyalah sebuah taktik dari sebuah strategi besar. Disini peneliti juga perlu menjelaskan tentang fundamentalisme dan radikalisme. Pengertian keduanya oleh peneliti dipakai dalam arti politik, terutama politik Islam. Fundamentalisme adalah ideologi dan gerakan politik yang dimaksudkan untuk membangun seluruh tata kehidupan manusia, berdasarkan ruh dasar Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebenarnya istilah ini pertama kali digunakan untuk menunjuk kepada gerakan Protestan di Amerika Serikat. Basis gerakan fundamentalisme selalu agama, berbeda dengan radikalisme, yang dikenakan kepada kelompok politik yang berusaha mengubah tatanan lama. Radikalisme biasanya dikenakan kepada sosialisme marxis dan juga kelompok Islam fundamental. Radikalisme adalah manifestasi dari spririt fundamentalisme.

bagi bangsa dan pemerintah Indonesia untuk mengenal lebih dalam persoalan-persoalan negerinya.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang, peneliti merasa perlu membatasi masalah agar pembahasan lebih fokus kepada pokok persoalan yang menjadi tema sentral dari proposal penelitian ini. Pembatasan masalah perlu dilakukan agar apa yang menjadi persoalan menjadi jelas.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membatasi masalah dalam dua hal, yaitu:

1. Apakah motif-motif terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia tentang terorisme di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji dan menganalisa latar belakang politik terjadinya terorisme di Indonesia.
- b. Mengetahui secara jelas motif-motif dan tujuan-tujuan terorisme yang terjadi di Indonesia.
- c. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia tentang terorisme di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik diharapkan memperkaya khazanah kajian-kajian sosiologis, terutama sosiologi agama dilingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini dalam rangka menghambat, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kebijakan yang diharapkan adalah tindakan preventif terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan aksi terorisme.

D. Tinjauan Pustaka

Tema tentang terorisme sudah sering dibahas, baik dalam bentuk buku-buku, jurnal, majalah, maupun karya tulis ilmiah lainnya, tetapi tidak satupun dari karya tulis tersebut yang berbicara langsung terorisme yang terjadi di Indonesia. Meski penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, tetapi bisa dikategorikan sebagai penelitian orisinal.

Perbedaan penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji secara komprehensif motif-motif terorisme di Indonesia serta kebijakan pemerintah Indonesia tentang terorisme. Adapun beberapa buku yang digunakan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini. Buku-buku tersebut sebagai pembanding dengan penelitian ini.

Nurchahaya Tandang Assegaf, dalam bukunya *Terorisme Internasional Bentuk Amerika, Indonesia dan Dinamika Internasional*, terutama bagian V “Hegemoni Amerika Serikat dan Terorisme Internasional”, menjelaskan

bahwa merebaknya isu terorisme paska perang dingin disebabkan oleh dua faktor yaitu:¹²

Pertama, umumnya media massa dan analis Barat secara sistematis mendiskreditkan negara-negara anti Barat, dikarenakan negara atau rezim yang dimaksud dianggap membahayakan Barat dan kepentingannya. *Kedua*, tindakan sewenang-wenang Amerika Serikat sebagai pemegang kendali ekonomi-politik dan keamanan di seluruh dunia.

Dalam kasus terorisme di Indonesia, Nurcahaya mengimbau kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, agar dalam penyelesaiannya mengajak orang-orang atau kelompok-kelompok yang dituduh sebagai dalang aksi terorisme di Indonesia duduk dalam satu meja dan secara bersama-sama merumuskan definisi terorisme.

Buku lain yang membahas terorisme adalah karya Jawahir Thantowi, dengan judul *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Menurut Thantowi, terorisme sebagai fenomena baru pertarungan politik diakibatkan oleh dua faktor yaitu;¹³ *pertama* ketidakadilan yang dialami sebagian umat Islam. Ketidakadilan ini disebabkan perilaku ideologi imperialisme global yang telah memberikan kontribusi terhadap timbulnya radikalisme dan terorisme.

Ketidakadilan struktural tersebut tercermin dalam penggunaan bahasa oleh media massa dan analis Barat, bahwa yang berbau Islam adalah teroris.

¹² Nurcahaya Tandang Assegaf, *Terorisme Internasional Bentuk Amerika, Indonesia dan Dinamika Internasional* (Jogjakarta: PT. Ombak, 2004), hlm. 206.

¹³ Jawahir Thantowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional* (Jogjakarta: UII Press, 2004), hlm.50-53.

Kedua, diskriminasi dan ketidaksetaraan pelayanan. Selama berabad-abad Negara-negara Muslim diperlakukan secara diskriminatif melalui institusi hukum dan politik. Diskriminasi yang terjadi tidak hanya dibidang politik, ekonomi, dan hukum, tetapi juga terdapat diskriminasi rasial. Inti buku Jawahir, bahwa terorisme adalah sebagai buah dari ketidakadilan imperialisme global.

Buku *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, yang ditulis oleh Abdul Wahid dkk menguraikan tentang terorisme sebagai hasil dari pemahaman teologis dan pandangan keagamaan yang tekstual dan skripturalis. Akibat dari pandangan teologis yang sempit seperti itu, maka memunculkan sikap radikal dalam diri pemeluknya.

Buku ini terutama memberikan perhatian terhadap terorisme yang terjadi di Indonesia, dengan mengutip berita dimedia dan pernyataan tokoh-tokoh agama Islam Indonesia, menyimpulkan bahwa Islam tidak membenarkan segala bentuk kekerasan, apalagi kekerasan yang diarahkan kepada fasilitas publik, dalam mencapai tujuannya, apalagi mengatasnamakan Jihad.

Islam adalah agama yang sepenuhnya menghargai kemanusiaan. Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mencapai keadilan, kehormatan, akan tetapi cara-cara yang dilakukan tidak menggunakan metode-metode kekerasan. Pengeboman yang terjadi beruntun di Indonesia bukan ajaran dari

agama, melainkan tragedi kemanusiaan, tidak bisa dibelokkan kepada komunitas agama manapun.¹⁴

Ketiga buku ini menggunakan metode legal formal dalam mendekati terorisme. Karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hukum maka terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Berbeda dengan Abdul Wahid dan Nurcahaya, Jawahir Thontowi dalam menganalisa fenomena terorisme tidak melulu melihatnya dari perspektif hukum akan tetapi ia melengkapinya dengan analisa sosiologis.

Tema serupa ditulis oleh Abdul Wakhid Al-Adziem dalam skripsinya dengan judul *Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Adziem dalam skripsinya menjelaskan definisi dan menggambarkan ciri-ciri terorisme, oleh penulis tindak terorisme dilihat melalui perspektif hukum Islam. Sebagaimana dijelaskannya dalam pokok masalah dari penelitiannya, yang menjadi tema sentral adalah apakah terorisme dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang terorisme.

Menurutnya Islam tidak membenarkan tindakan apapun yang dimaksudkan untuk menebarkan rasa gentar dan khawatir dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas publik. Penulis juga menguraikan bahwa terorisme internasional modern ditandai dengan pembajakan pesawat El-Boing 707 rute Roma-Tel Aviv yang dilakukan oleh anggota *Popular Front*

¹⁴ Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 42-43.

For The Liberation of Palestina (PFLP). Pembajakan serupa terjadi di Peru tahun 1937. Sejak pembajakan di Peru ini aksi-aksi serupa mulai marak.¹⁵

Dalam skripsi ini juga diuraikan dampak sosial-politik aksi terorisme hari Selasa 11 September 2001. Paska tragedi ini dunia dilanda kecemasan dan ketakutan. DK PBB lewat resolusinya tanggal 28 September 2001 memberikan legitimasi kepada Amerika Serikat untuk memerangi terorisme.¹⁶ Aksi Amerika yang kemudian mengundang pembalasan dari sebagian umat Islam di Indonesia.

Namun, skripsi al-Adziem, tidak menguraikan masalah-masalah yang dapat menimbulkan tindak terorisme. Bagaimana hubungan terorisme dengan situasi politik Indonesia saat terorisme terjadi. Lebih lanjut skripsi yang ditulis oleh saudara al-Adziem ini tidak menjelaskan motif sosio-politik dan sosio-religi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Karenanya, peneliti menganggap penting untuk melanjutkan penelitian yang telah dimulai oleh saudara al-Adziem. Peneliti mengkonsentrasikan penelitian ini kepada motif-motif dan tujuan-tujuan terorisme yang terjadi di Indonesia dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan terorisme:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya baik yang berupa buku atau skripsi terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan. Semua penelitian yang disebutkan di atas menggunakan

¹⁵ Abdul Wakhid al-Adziem, "Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN SUKA, 2003, hlm.26.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

pendekatan legal formal. Karenanya kesimpulan yang diambil didasarkan kepada andaian-andaian hukum. Sementara penelitian ini didasarkan kepada analisis dan perspektif sosiologis.

E. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah dan mendapatkan kejelasan tentang tema-tema yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan terorisme dan kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia, peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain adalah:

1. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial digunakan dalam penelitian ini untuk menyelami dan memahami situasi batin, motif-motif dan tujuan-tujuan dari aksi si pelaku teror. Secara operasional teori tindakan sosial berusaha mencari akar persoalan terorisme yang terjadi di Indonesia, karena yang menjadi objek dari aksi-aksi "teroris" di Indonesia sebagian besar adalah simbol-simbol kebudayaan Barat dan globalisasi.

Dengan teori tindakan sosial dapat diketahui segala alasan, motif dan tujuan serta ekses politik yang diharapkan dari tindakan pelaku terorisme di Indonesia. Teori ini juga secara aplikatif digunakan untuk melihat terorisme di Indonesia terkait dengan keadaan umat Islam dibelahan dunia lainnya atau hanya akibat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap merugikan umat Islam. Teori tindakan sosial akan diterapkan kepada objek penelitian ini langsung kepada pengalaman

dan perasaan dari si pelaku teror beserta sekian motivasi yang mendorongnya.

Untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dengan teori tindakan sosial, maka dibawah ini akan diuraikan definisinya. Teori tindakan sosial berasal dari Sosiolog Max Weber dari Jerman. Weber memberikan perhatian terhadap tindakan sosial. Yang dimaksudkannya dengan tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai arti subyektif terhadap dirinya dan diorientasikan terhadap orang lain.¹⁷ Tindakan sosial melingkupi setiap pola dan jenis perilaku manusia, yang dengan penuh makna diarahkan untuk mempengaruhi tindakan orang lain.¹⁸

Berbeda dengan Emile Durkheim, yang memandang sosiologi sebagai studi tentang lembaga-lembaga dan institusi-institusi sosial, ditangan Weber sosiologi bergerak ke arah, dimana manusia dipandang sebagai seorang aktor yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Terjadi pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri setiap anggota masyarakat, yang berakibat terhadap isi dan pola tindakannya.¹⁹

¹⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Tej), Alimandan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 38.

¹⁸ Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber* (Tej), Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 186.

¹⁹ K.J. Veeger, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. 171.

Tindakan sosial yang dilakukan oleh si aktor, baik dalam lingkup terkecil masyarakat seperti keluarga ataupun kehidupan bernegara, dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan yang dalam pemaknaan si aktor terkait erat dengan perbaikan seluruh sistem yang berlaku. Makna subyektif dalam tindakan sosial ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.

Pelaku mempunyai tujuan dengan tindakan yang dilakukannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai biasanya didasarkan dan didorong oleh sebuah motivasi. Ada serangkaian pentahapan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, melalui permenungan, perencanaan dan pengambilan keputusan.²⁰

Terdapat internalisasi nilai sebelum tindakan dilakukan. Yang demikian berarti bahwa tindakan yang dipilih oleh sang aktor telah dipertimbangkan secara cermat, akurat dan matang. Sang aktor pun telah memperhitungkan akibat-akibat baik dan buruk dari tindakannya. Bahkan sang aktor tidak merasa bersalah, apabila tindakannya merugikan orang lain, dan karena keyakinannya bahwa apa yang dia lakukan benar, ia mengajak orang lain untuk mengikutinya.

2. Teori Sosiologi Politik

Teori sosiologi politik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui penyebab terorisme yang terjadi di Indonesia. Terorisme

²⁰ *Ibid.*

bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, akan tetapi ia terkait dengan konflik politik dan antagonisme politik antar berbagai kepentingan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara politik yang lazim.

Alasan untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme adalah karena saluran-saluran politik resmi telah tersumbat, atau karena tidak adanya sistem politik ideal bagi mereka. Sosiologi politik akan memperlihatkan dan menjelaskan hubungan antara gejala sosial dan gejala politik dari terorisme.²¹

Teori sosiologi politik juga akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan pendistribusian kewenangan dari lembaga-lembaga Negara, seperti eksekutif, legislatif, kehakiman, kepolisian, militer dan kelompok-kelompok interest lainnya, dalam usaha penanggulangan terorisme. Lembaga-lembaga Negara ini yang berwenang memberantas terorisme.

Untuk mendapat gambaran, sedikit akan dijelaskan definisi sosiologi politik. Terdapat dua aliran pemikiran atau interpretasi yang saling bertentangan dalam sosiologi politik. Perbedaan pemikiran ini didasarkan kepada arti kata politik, kelompok pertama berpendapat bahwa politik merupakan arena pertarungan perebutan kekuasaan antarindividu atau antarkelompok.

Kekuasaan memungkinkan individu atau kelompok untuk mengendalikan dan mengeksploitisir individu atau kelompok lain demi

²¹ Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 295.

kepentingan mereka. Sementara kelompok yang dieksploitisir merasa berkewajiban untuk melawan dan membinasakannya. Dalam pengertian ini, politik bermakna antagonistik.

Kelompok kedua memandang politik sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kekuasaan menurut pendukung tafsiran ini bertugas melindungi segenap kepentingan dan kemaslahatan umum (*common good*).²² Disini politik bermakna integratif. Dua pemikiran tersebut mewakili sifat paradoksial atau ambivalen politik dan kekuasaan.²³ Kemenduaan wajah politik dan kekuasaan bersifat positif dan negatif.

Menurut Maurice Duverger, para ahli sosiologi politik terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang beranggapan sosiologi politik sebagai ilmu tentang Negara, sementara yang lain, berpendapat bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Duverger sendiri termasuk yang kedua.

Dalam arti yang pertama, maka sosiologi politik digunakan untuk menunjuk kategori khusus dalam masyarakat, yang disebut Negara. Di dalam Negara terdapat *nation state*, menunjuk kepada masyarakat

²² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Terj), Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27.

²³ Alfian dalam kata pengantar buku sosiologi politik karya Maurice Duverger, menyatakan bahwa politik dan kekuasaan diibaratkan Dewa Janus dalam tradisi Yunani kuno. Dewa Janus dilukiskan sebagai Dewa yang bermuka dua yang mencerminkan kontradiksi dan ambivalensi.

nasional, komunitas yang menempati suatu wilayah, dan *government state*, menunjuk kepada penguasa atau pemimpin dari masyarakat tersebut.

Sementara konsep yang belakangan menyatakan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Kekuasaan dalam pengertiannya yang luas tidak hanya terbatas kepada kekuasaan yang dimiliki Negara, tetapi kekuasaan yang beroperasi dalam setiap level masyarakat. Dari asosiasi kecil di pedesaan, perusahaan hingga organisasi Negara. Jadi sosiologi politik dalam pengertian ini menganalisa fenomena kekuasaan dalam setiap masyarakat.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku yang membahas terorisme dan data yang dihimpun dari media massa cetak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik, yaitu dengan mendeskripsikan definisi dan motif-motif terorisme. Peneliti akan menguraikan hubungan terorisme yang terjadi di Indonesia dengan kejadian-kejadian di dunia Islam terutama di Timur Tengah. Peneliti juga akan menguraikan fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia beserta dengan kebijakan pemerintah RI dalam penanggulangannya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 17-20.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah; *pertama* teknik dokumentasi²⁵ yaitu pengumpulan data yang diambil dari buku-buku dan penelitian sebelumnya yang secara langsung berbicara permasalahan yang akan diteliti atau yang tidak langsung namun relevan sebagai pembanding. Peneliti juga menggunakan data-data yang didapat dari berbagai media massa cetak di Indonesia.

*Kedua, free interview*²⁶ yaitu teknik wawancara bebas dengan beberapa orang yang dianggap mengerti tentang seluk beluk terorisme khususnya terorisme yang terjadi di Indonesia.²⁷ *Ketiga, focus group discussion*,²⁸ yaitu teknik melalui diskusi-diskusi rutin yang dilakukan peneliti untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang terorisme.

²⁵ Pada dasarnya data-data yang tersebar diberbagai dokumen tidak hanya dikhususkan untuk penelitian sejarah, namun data dokumentatif ini juga dapat digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang lain, termasuk sosiologi. Dokumen sebagai bahan klasik biasanya digunakan untuk menjawab persoalan tentang apa siapa, kapan dan dimana. Adapun dokumen yang terdapat di Indonesia sebagaimana diidentifikasi oleh Sartono Kartodirdjo, yaitu; 1. otobiografi; 2. surat pribadi, buku-buku, catatan harian, memoir; 3. surat kabar; 4. dokumen pemerintah; 5. roman dan cerita rakyat. Lihat. Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 44-48.

²⁶ *Free Interview* adalah jenis wawancara tak berstruktur, dimana Pewawancara yang memakai teknik ini biasanya hanya dibimbing oleh *interview guide* yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang ingin dipersoalkan oleh pewawancara. Lihat J.Vredenbregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 93. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa *free interview* adalah teknik wawancara yang tidak mempunyai pusat, pertanyaan yang diajukan bisa berpindah-pindah dari satu pokok masalah ke pokok yang lain, sementara data yang diperoleh bisa beragam. Koentjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 139.

²⁷ Peneliti mengelompokkan narasumber wawancara menjadi tiga kelompok: 1. Kiai, 2. Pengamat Politik, 3. Wartawan.

²⁸ Dilakukan dengan beberapa teman dari Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD).

discussion,²⁸ yaitu teknik melalui diskusi-diskusi rutin yang dilakukan peneliti untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang terorisme.

3. Analisa Data

Setelah data dapat dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa data. Tahap ini sangat menentukan terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif²⁹ yaitu suatu analisis dengan mengolah data-data yang kemudian data tersebut digeneralisir, diklasifikasikan dan kemudian dianalisa.

G. Sistematika Penelitian

Agar diperoleh hasil penelitian yang ilmiah, sistematis dan analitis maka pembahasan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang beberapa bagian yaitu; *Pertama* latar belakang masalah, sub bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengapa tema ini dipilih. *Kedua* batasan atau rumusan masalah, agar penelitian ini menyentuh akar persoalan maka perlu dilakukan rumusan atau batasan masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. *Keempat*, tinjauan pustaka, sub bab ini menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang ada

²⁸ Dilakukan dengan beberapa teman dari Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD).

²⁹ Pendekatan kualitatif digunakan apabila data yang dikumpulkan berjumlah sedikit, berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris.

kaitannya dengan penelitian ini. *Kelima* menguraikan kerangka teori yang mendasari penelitian ini. *Keenam*, memilih metode penelitian.

Bab II, menguraikan tentang sejarah dan definisi terorisme serta kelompok-kelompok Islam radikal atau Islam militant yang ada di Indonesia. Bab dua ini juga akan menguraikan dan menjelaskan motif-motif dan tujuan-tujuan dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Apakah terorisme merupakan sentimen keagamaan atau murni konflik politik belaka? Apakah terorisme di Indonesia terkait dengan kemunduran dunia Islam terutama Timur Tengah atau sebagai reaksi terhadap aksi-aksi politik Barat dan Amerika Serikat yang dianggap merugikan umat Islam?

Bab III, menjelaskan tentang situasi politik nasional Indonesia sebelum aksi terorisme terjadi di Indonesia. Di bab ini akan diuraikan faksi-faksi politik yang bertikai, di mana situasi politik yang tidak stabil tersebut oleh kelompok "teroris" dijadikan kesempatan untuk melancarkan aksinya. Bab III ini juga akan menjelaskan kebijakan-kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia dalam usaha meredam, menangkal dan memberantas terorisme.

Bab IV, bab ini berisi analisa tentang terorisme dan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Bab ini juga menganalisa politik Indonesia yang melatarbelakangi tindakan terorisme dan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang terorisme. Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok masalah, dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi kesinambungan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pembahasan dua pokok permasalahan beserta analisisnya, maka perlu disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terorisme tidak identik dengan Islam. Setiap agama mempunyai potensi memotivasi terorisme. Terorisme yang terjadi di Indonesia sangat kompleks. Kompleksitas disebabkan oleh situasi ekonomi politik domestik Indonesia dan dunia. Terorisme di Indonesia hanyalah reaksi sebagian umat Islam Indonesia terhadap aksi-aksi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya yang merugikan umat Islam. Faktor penyebab terorisme yang melanda Indonesia bersifat internal dan eksternal. Terdapat beberapa faktor umum penyebab tumbuhnya terorisme, yaitu; kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*), dan kesenjangan (*inequality*). Secara sosiologis politis terorisme mempunyai kaitan dengan gerakan NII/TII yang mencita-citakan Negara Islam. Walaupun gerakan NII dapat dipatahkan oleh TNI pada tahun 1962, namun cita-cita untuk mendirikan Negara Islam tidak pernah padam dari para aktivisnya. Cita-cita ini yang mendorong mereka kembali mengkonsolidasikan diri dalam sel-sel gerakan untuk

mewujudkan *Daulah Islamiyyah*. Terorisme di Indonesia oleh para pelakunya dipahami sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami umat Islam di Timur Tengah, terutama umat Islam Afghanistan, Iraq, Palestina dan Negara-negara muslim lainnya. Ketidakadilan yang dialami oleh umat Islam dinegara-negara tersebut, diakibatkan oleh ulah dan kepongahan Amerika Serikat dan Israel. Dengan aksi terorisme diharapkan AS dan sekutunya mengubah kebijakan-kebijakan politik luar negerinya. Menurut peneliti, faktor-faktor tersebut memunculkan motif terorisme di Indonesia, yaitu motif politik, motif agama dan motif ideologis.

2. Fenomena terorisme telah menimbulkan banyak korban, baik fisik, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kenyataan ini sangat menyakitkan bangsa Indonesia. Terorisme bukan hanya persoalan pemerintah, bukan hanya tanggungjawab kepolisian. Melainkan menjadi tanggungjawab bersama yang harus dicegah dan ditanggulangi oleh seluruh komponen bangsa secara sungguh-sungguh. Sebagai pelindung warga negara, pemerintah sebagai aparatus negara, mengeluarkan beberapa kebijakan politik untuk menghambat dan memerangi terorisme. Kebijakan pemerintah RI lebih bersifat reaktif daripada preventif. Kebijakan lebih menekankan pendekatan kontraterorisme daripada antiterorisme. Padahal kebijakan antiterorisme seperti mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan dan menegakkan kepastian hukum adalah hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam menanggulangi terorisme. Kebijakan

terorisme adalah penguatan institusi hukum melalui perundang-undangan, pembentukan detasemen 88 antiteror, pembentukan deks antiteror, pengaktifan komando teritorial (KOTER) TNI, dan peningkatan kerjasama luar negeri. Kebijakan tentang terorisme perlu mempertimbangkan situasi domestik, regional, dan internasional, baik secara sosiologis, politis, dan ekonomis.

B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa, pemerintah sebagai pemegang kebijakan atas penanggulangan terorisme sudah seharusnya permasalahan seperti ini mendapatkan perhatian khusus supaya tidak terjadi kesalahan dalam penanggulangannya. Oleh sebab itu pemerintah perlu memperhatikan secara mendalam faktor-faktor atau motif-motif terorisme yang terjadi di Indonesia.
2. Hendaknya lembaga-lembaga Negara yang mempunyai wewenang dalam penanggulangan terorisme saling bekerjasama dengan baik, sehingga upaya-upaya pemberantasan terorisme berjalan efektif dan tepat sasaran. Begitu juga dengan kebijakan tidak hanya mempertimbangkan penindakan, tapi juga memperhatikan pencegahan timbulnya benih-benih terorisme seperti diskriminasi, kemiskinan, supremasi hukum, dll.
3. Hendaknya semua pihak ikut merenungkan dan memikirkan serta terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan dini tindak terorisme dengan cara-cara demokratis. Menjauhi sikap diskriminatif. Berlaku adil bagi semua.

3. Hendaknya semua pihak ikut merenungkan dan memikirkan serta terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan dini tindak terorisme dengan cara-cara demokratis. Menjauhi sikap diskriminatif. Berlaku adil bagi semua. Pemberantasan terorisme harus tetap dalam koridor hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia. Yang terpenting adalah menghindari kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan benih-benih terorisme, karena terorisme selalu terkait erat dengan politik.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku:

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Terj. Ali Noerzaman, Yogyakarta: Qalam, 1993.

Ahmad Maftuh Abegebriel dan A Yani Abeveiro, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004.

Al-Adziem, Abdul Wakhid, "Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN SUKA, 2003.

Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro Nasional Liberation Front*, Jakarta: Darul Falah, 1419 H.

-----, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M Kartosoewirjo, Fakta dan Data Sejarah Darul Islam, cet.2*, Jakarta: Darul Falah, 1999.

Ali Syu'aibi dan Gils Kibil, *Meluruskan Radikalisme Islam*, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004.

Assegaf, Nurcahaya Tandang, *Terorisme Internasional Bentuk Amerika, Indonesia dan Dinamika Internasional*, Yogyakarta: Ombak, 2004.

Awwas, Irfan S, *Menelusuri Perjalanan Jihad S.M. Kartosoewirjo Proklamator Negara Islam Indonesia*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

-----, *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Bashori, Ahmad Dumyathi (ed), *Osama bin Laden Melawan Amerika*, Bandung: Mizan, 2001.

Budiarjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Bandung: Mizan, 1991.

- Degel, Holk H, *Darul Islam dan Kartosoewirjo Angan-angan Yang Gagal*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya-tulis Marx, Durhkeim dan Max Weber*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Hakim, Lukman, *Terorisme di Indonesia*, Surakarta: Forum Stadi Islam Surakarta(FSIS), 2004.
- Rusdi Marpaung dan Al-Araf (ed), *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005.
- Husaini, Adian, *Jihad Osama Versus Amerika*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosilogi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Jurgensmeyer, Mark, *Terorisme Para pembela Agama* Yogyakarta: Tarawang Press, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Laqueur, Walter, *New Terrorism Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*, Terj Tony Febrianto, Jogjakarta: Juxtapose, 2005.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Terj Kartini Kartono, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muzaffar, Chandra, *Muslim, Dialog dan Teror*, Jakarta: Profetik, 2003.
- Pinardi, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Jakarta: Aryaguna, 1964.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Komtemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Riff, Michael A, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Terj. A. Miftahudin dan Hartian Silawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Samudra, Imam, *Aku Melawan Terorisme*, Solo: Jazera, 2004.

Thontowi, Jawahir, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Jogjakarta: UII Press, 2004.

Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Wim Beuken dan Karl Josef Kuschel (et al), *Agama Sebagai Sumber Kekerasan? Terj Imam Baihaqie*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Veeger, K.J., *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.

Vredenburg, J., *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2002, Jakarta: PT Sekala Darma Karya, 2002.

Kelompok Majalah dan Surat Kabar:

Tempo, 17-23 September 2001.

Tempo, 31 Desember 2001- 06 Januari 2002.

Tempo, 21-27 November 2005.

Kompas, 8 Oktober 2005.

Kompas, 6 Oktober 2005.

Kompas 10 Oktober 2005.

Kompas 13 Oktober 2005.

Kompas 14 Oktober 2005.

Kelompok Jurnal:

Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume 01 No. 03 Oktober 2004.

Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume 01 No. 02 Juli 2004.

Jurnal Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Volume. 33 No. 01
Maret 2004.

Kelompok Artikel, Opini dan Makalah:

Azra, Azyumardi, "Gerakan Islam Militan di Asia Tenggara: Identitas dan Tantangan", *Jurnal CSIS*, XXXIII, Maret 2004.

Conboy, Kenneth, "Hantu Terorisme di Indonesia", *Tempo*, 17-23 September 2001.

Imawan, Riswandha, "Hilangnya Keseimbangan Jagat Dewa-Dewi", *Tempo*, 31 Desember-6 Januari 2002.

Karman, Yonky, "Depolitisasi Terorisme", *Kompas*, 21 November 2005.

Misrawi, Zuhairi, "Menggerebek Teroris", *Kompas*, 13 Oktober 2005.

Munarman, "Perang Ideologi dan Terorisme", *Republika*, 9 Desember 2005.

Musa, Ali Maskan, "Terorisme Sebagai Soft Issues", *Jawa Pos*, 26 November 2005.

Nitibaskara, Th Ronny Rahman, "Bom Bali Jilid II", *Kompas*, 3 Oktober 2005.

Widagyo, Badjori, "Jangan Pernah Lengah Terhadap Teroris", *Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*, I, Juli 2004.

Z.T.F., Pradana Boy, "Indonesia-Australia Pasca Bom Bali 2", *Jawa Pos*, 5 Oktober 2005.

Kelompok Website:

www. Tempo Interaktif, 23 Agustus 2004.

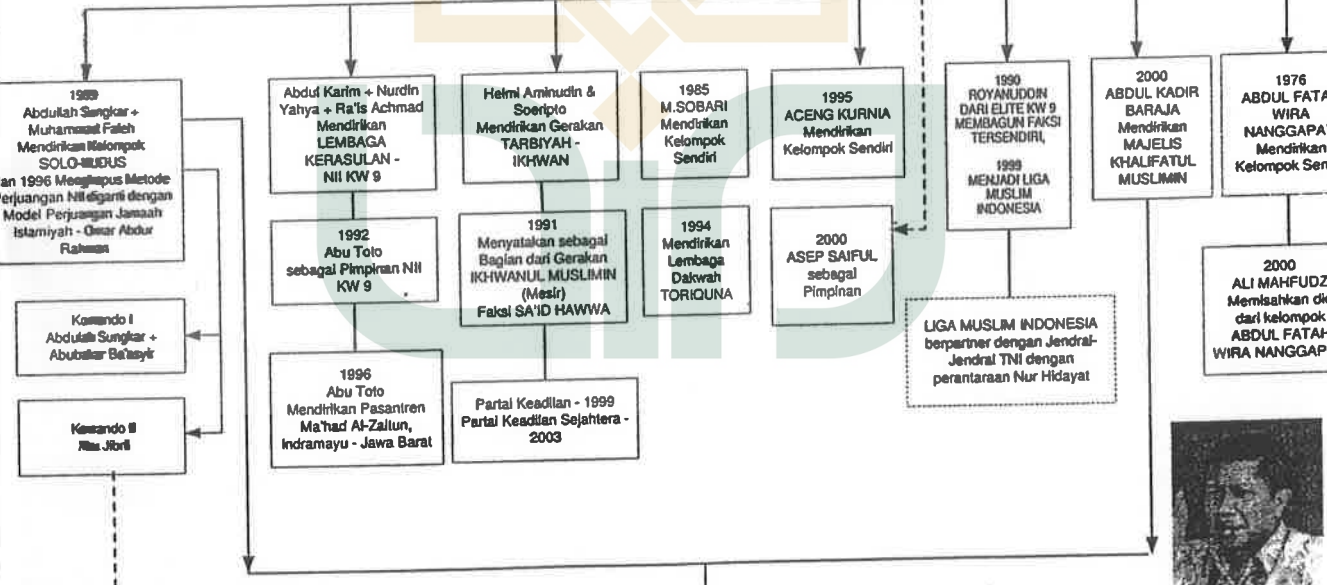
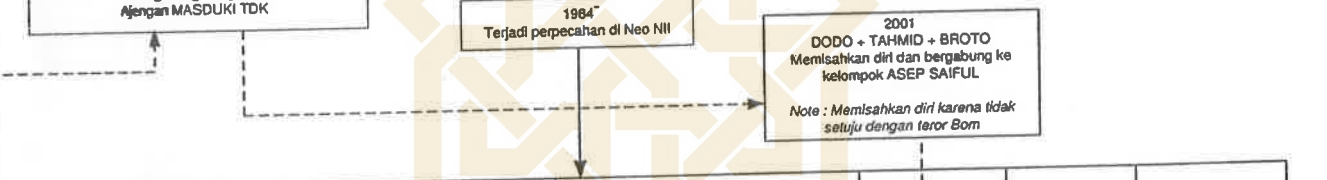
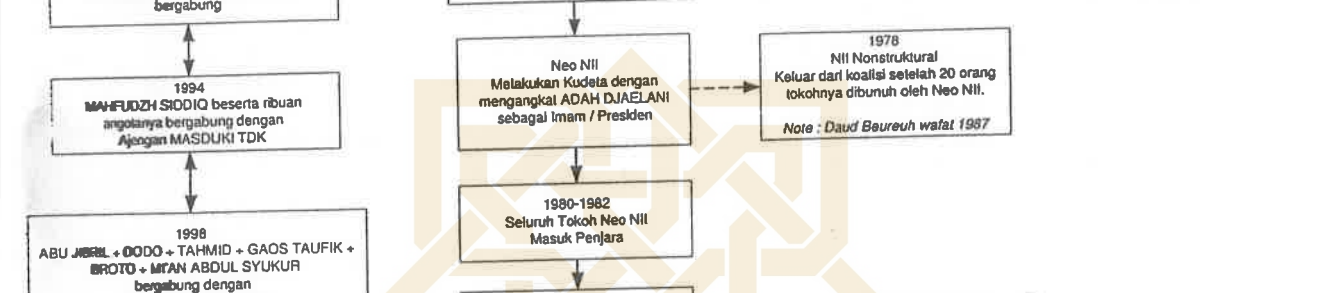
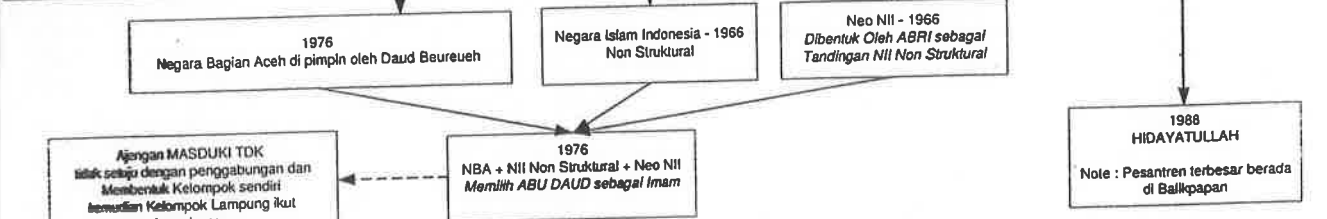
www. Tempo Interaktif, 20 Agustus 2004.

www. Tempo Interaktif, 24 Desember 2005.



PETA Gerakan Negara Islam Indonesia

NEGARA ISLAM INDONESIA - DI/TII
07 AGUSTUS 1949, Malangbong-Jawa Barat
Sekarmaji Marjan Kartosuwirjo
Anggota Laskar: 13.129 orang



arena Mengganti Metode Perjuangan NII dengan Model Perjuangan Jamaah Islamiyah, maka terjadi Kelompok SOLO-KUDUS terpecah dua jadi 2(dua) Komando.

Komando II yang dipimpin Abu Jibril tetapi ketika Abdullah Sungkar meninggal dunia (desember 1999), Abu Jibril kembali bersatu dengan Abu Bakar asyir. Sejak itu Komando II dipegang oleh Abu Bakar yang melaksanakan Teror Bom 1999-2002 koordinasi dengan Ajenan Masduki dan siapa saja yang mau membungkus usahanya.

Jamaah Islamiah terbagi menjadi 3 faksi : faksi Ideologis dipimpin oleh Abu Rusdan faksi Moderat dipimpin Abu Bakar Ba'asyir faksi Ekstrem (Pelaku teror bom) dipimpin oleh Hambali dan Zulkarnaen yang koordinasi dengan TNI dengan proyek pertama salah kasus Ambon, peledakan Bom di kedutaan sara Phillina-Jakarta

Cisarua - Desember 1999
Musyawarah antar Kelompok/Fraksi diadakan di Cisarua - Jawa Barat. Musyawarah gagal mengambil keputusan tentang siapa pemegang Komando karena Abdullah Sungkar meninggal dunia.
Komando Jamaah Islamiyah beralih ke Abubakar Ba'asyir

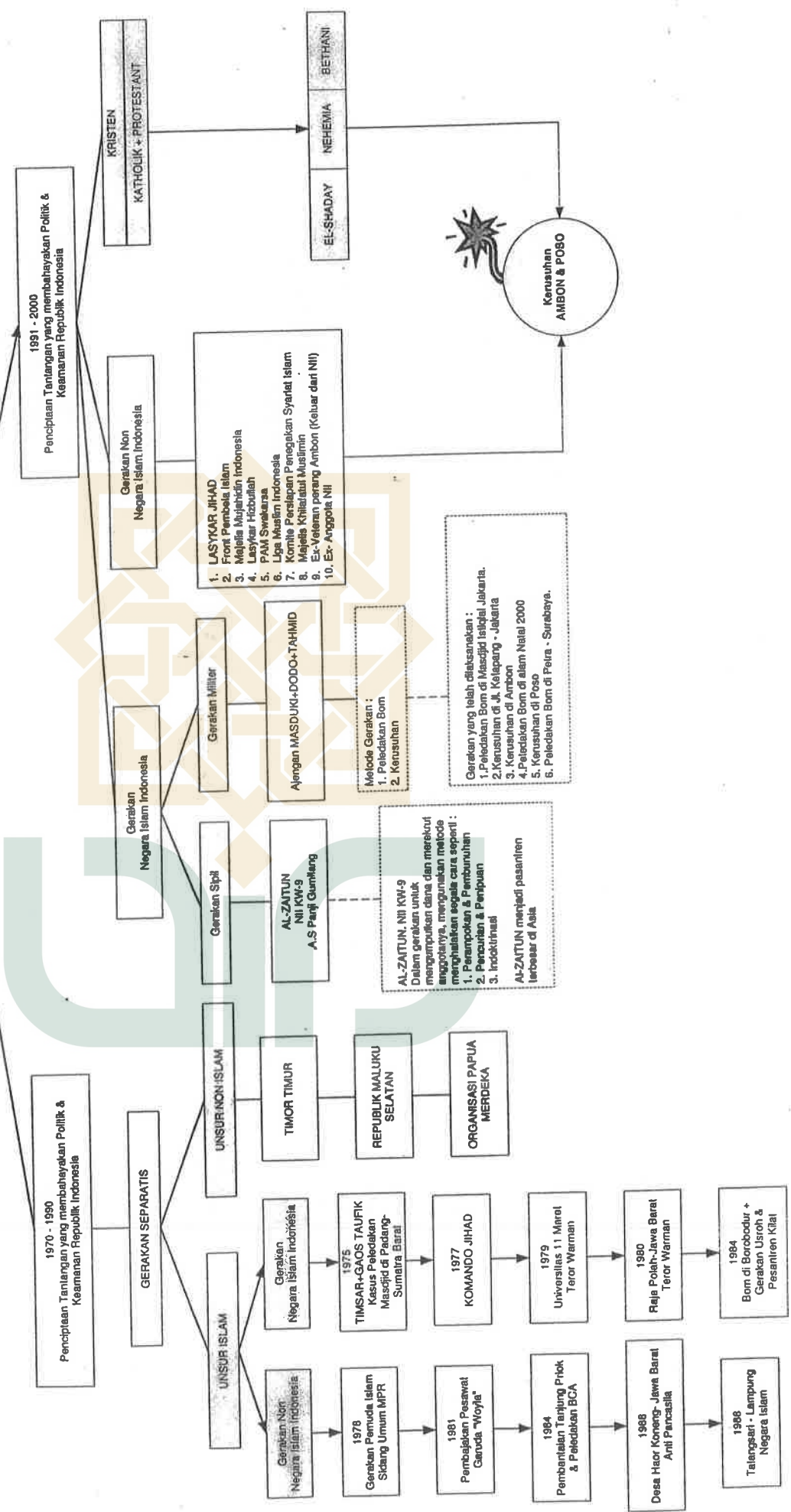
Jogyakarta - Agustus 2000
Kongres MUJAHIDIN ke-1
Mengangkat ABUBAKAR BA,ASYIR sebagai Amir Majelis Mujahidin Indonesia akibatnya Jamaah Islamiyah tidak mengakui lagi Abubakar Ba'asyir sebagai Pimpinan Jamaah Islamiyah

Kolonel TNI-AU ABDUL HARIS bekerja di Badan Intelijen Nasional (BIN).
1. Tahun 1992 setelah pulang dari Arab Saudi masuk ke dalam Gerakan NII & Gerakan Islam lainnya, termasuk Gerakan di Ambon & Poso
2. Pada Kongres Mujahidin I Abdul Haris sebagai panitia bagian Hubungan antar Mujahid
3. Abdul Haris adalah orang yang sangat dekat dengan Abu Jihad + Abu Jibril + Abu Dzar + Umar Al farouq + Hambali



KRONOLOGI POLA PROGRAM PENCIPTAAN STABILITAS KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1968 - 2000
 Kebijakan Politik & Keamanan REGIME ORDE BARU Republik Indonesia
 Note : Kebijakan ini disebabkan pada Rapat Pimpinan ABRI di Istana Merdeka, Maret 1968, pada photo May-Jend Soemilro (Asisten G-1 Intelijen) yang mengatakan bahwa soaliah PKU/Komunis hancur, maka musuh bersama adalah kelompok Islam (berdasarkan wawancara dengan May.Jend (Purn) Abdul Kadir Besar



**POLA OPERASI INTELEJEN REZIME ORDE BARU
YANG DIGUNAKAN TERHADAP GERAKAN ISLAM**

1966
Gerakan Negara Islam Indonesia bangkit kembali dengan Format Baru yaitu Gerakan Dakwah (Fillah) Gerakan ini tidak melibatkan Ex-Komandan NII seperti Danu M.Hasan & Adah Djaelani cs. Karena Danu M.Hasan sudah menjadi pegawai di BAKIN. Gerakan ini dianggap pemerintah berbahaya bagi NKRI

**KEBUAKAN INTELEJEN
1968-1982**

**INVLTRASI TERHADAP GERAKAN NII (NEGARA ISLAM INDONESIA)
Dengan Menugaskan Ali Moertopo untuk menangani Gerakan Baru NII**

1971
**ABU DAUD BEUREUH & DANU M.HASAN
Ditugaskan untuk membentuk NII Tandingan**

1974 - 1975
Ex-Komandan NII digalang dan dibina dengan membentuk Gerakan NII dalam format Militer
Dibawah koordinasi
Kolonel AD. PITUT SOEHARTO

1974 - 1975
Kolonel AD. Pitut Soeharto menyatukan Gerakan NII Formal Dakwah (Fillah) dengan Ex-Komandan NI dengan tujuan untuk memilih Imamah (Pimpinan)

1976
Diadakan Musyawarah dengan hasil terbentuknya struktur Organisasi NII dengan menetapkan ABU DAUD BEUREUH sebagai Imam.
(Dengan demikian NII Filah & NII bentuk Militer menjadi satu Organisasi di bawah koordinasi BAKIN)

1976
Ex-Komandan NII Adjengan Masduki tidak setuju dengan Musyawarah dan Hasil keputusannya dan membentuk Faksi sendiri. Tetapi kelompok ini diprovokasi oleh Adah Djaelani, dibawah koordinasi oleh BAKIN membunuh tokoh-tokoh kelompok Filah. Dengan dalih bahwa Kelompok Filah adalah agen Intelijen

1976
Organisasi NII Pimpinan DAUD BEUREUEH menyusun rencana kudeta terhadap Soeharto
Ali Moertopo menjanjikan untuk memberikan Senjata yang berasal dari Libya sebanyak 1 Kapal

1976
Kelompok NII Lampung dibawah WARMAN tidak setuju dengan Musyawarah serta hasil keputusannya dengan melakukan counter membentuk Faksi sendiri. Kemudian bertekad untuk melakukan tindakan penentiban terhadap organisasi yang dipimpin DAUD BEUREUEH.
kelompok ini juga diprovokasi oleh Adah Djaelani yang, di koordinasi oleh BAKIN agar membunuh tokoh-tokoh kelompok Filah. Dengan dalih bahwa Kelompok Filah adalah agen Intelijen

1977
Aksi Persiapan Kudeta dilaksanakan dengan cara membentuk Organisasi NII di seluruh wilayah Pulau Jawa sekaligus mengangkat Pimpinan Daerah dan Wilayah NII melalui Bai'at.
Aksi persiapan ini merupakan legitimasi bagi Pemerintah melalui OPSUS (Operasi Khusus) untuk menangkap, mengadili dan memenjarakannya Di Jawa Timur 30 Orang Pimpinan yang sudah di Bai'at ditangkap dan dipenjarakan.

1980 - 1982
Seluruh Elite pimpinan NII di Jawa Barat, wilayah Jakarta dan Jawa Timur di Tangkap dan dipenjarakan oleh OPSUS - BAKORSTRANAS

1978
Aksi Pembatalan Gerakan NII yang di lakukan di Jawa-Timur dan Jawa-Tengah oleh Ali Moertopo disebut "KOMANDO JIHAD" (KOMJII) yang hendak melakukan Kudeta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abdulah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dan dipenjarakan kemudian diadili th 1982 dengan vonis 9 tahun. Th 1982 mereka dibebaskan, Th 1985 mereka hijrah ke Malaysia

1978 - 1983
Di Jawa Barat terjadi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Gerakan NII Filah (Gerakan NII tanpa Kekerasan)

Note : Gerakan yang dianggap berbahaya bagi keutuhan NKRI adalah Gerakan tanpa kekerasan dan Gerakan yang dipelihara sebagai musuh bayangan adalah Gerakan dengan Kekerasan / Radikal

**POLA OPERASI INTELEJEN REZIME ORDE BARU
YANG DIGUNAKAN TERHADAP GERAKAN ISLAM**

1985
Faksi Abdulah Sungkar dan Abubakar Ba'asyir memimpin Gerakan NII dari Malaysia. Gerakan ini berkembang serta berakar dikalangan Gerakan Islam di Malaysia dan NII di Indonesia setelah membangun program pengiriman Mujahid dan Relawan untuk bertatih Dalam Perang di Afganistan hlmgga tahun 1992, 1996 Gerakan berubah menjadi JAMAAH ISLAMIAH

**KEBIJAKAN INTELEJEN
1986-2001**

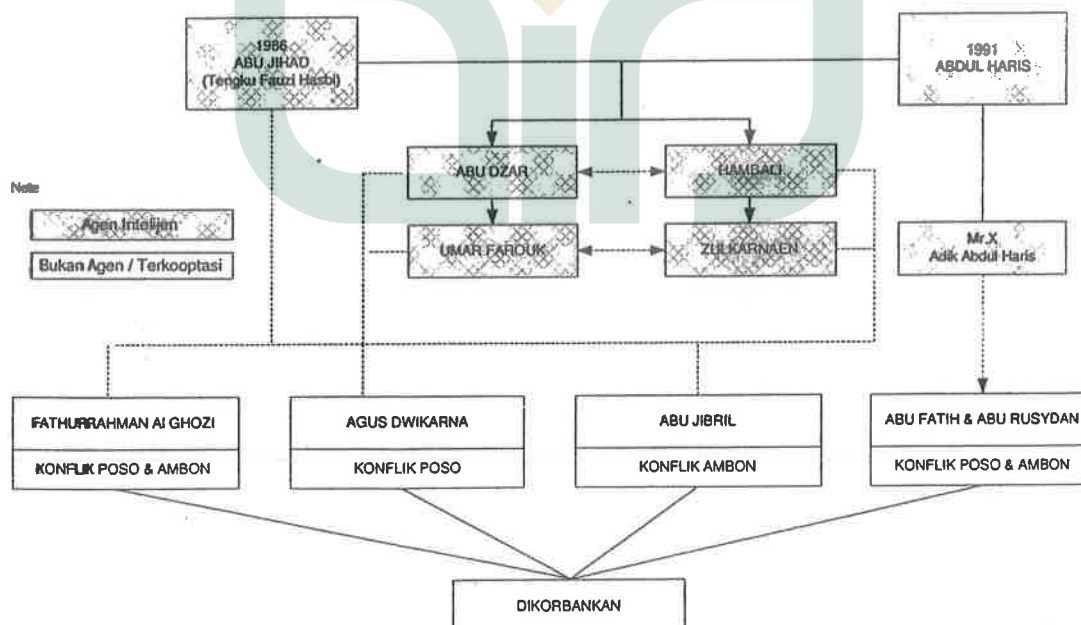
**INVILTRASI BAIIS (Badan Intelijen Strategis) TNI
TERHADAP GERAKAN JAMAAH ISLAMIAH**
Dengan Menugaskan ABU JIHAD (alpi) 1986 dan ABDUL HARIS (TNI) 1991

1999
JAMAAH ISLAMIAH berhasil di kooptasi TNI melalui Operasi Intelijen dengan melibatkan JAMAAH ISLAMIAH dalam Perang Ambon

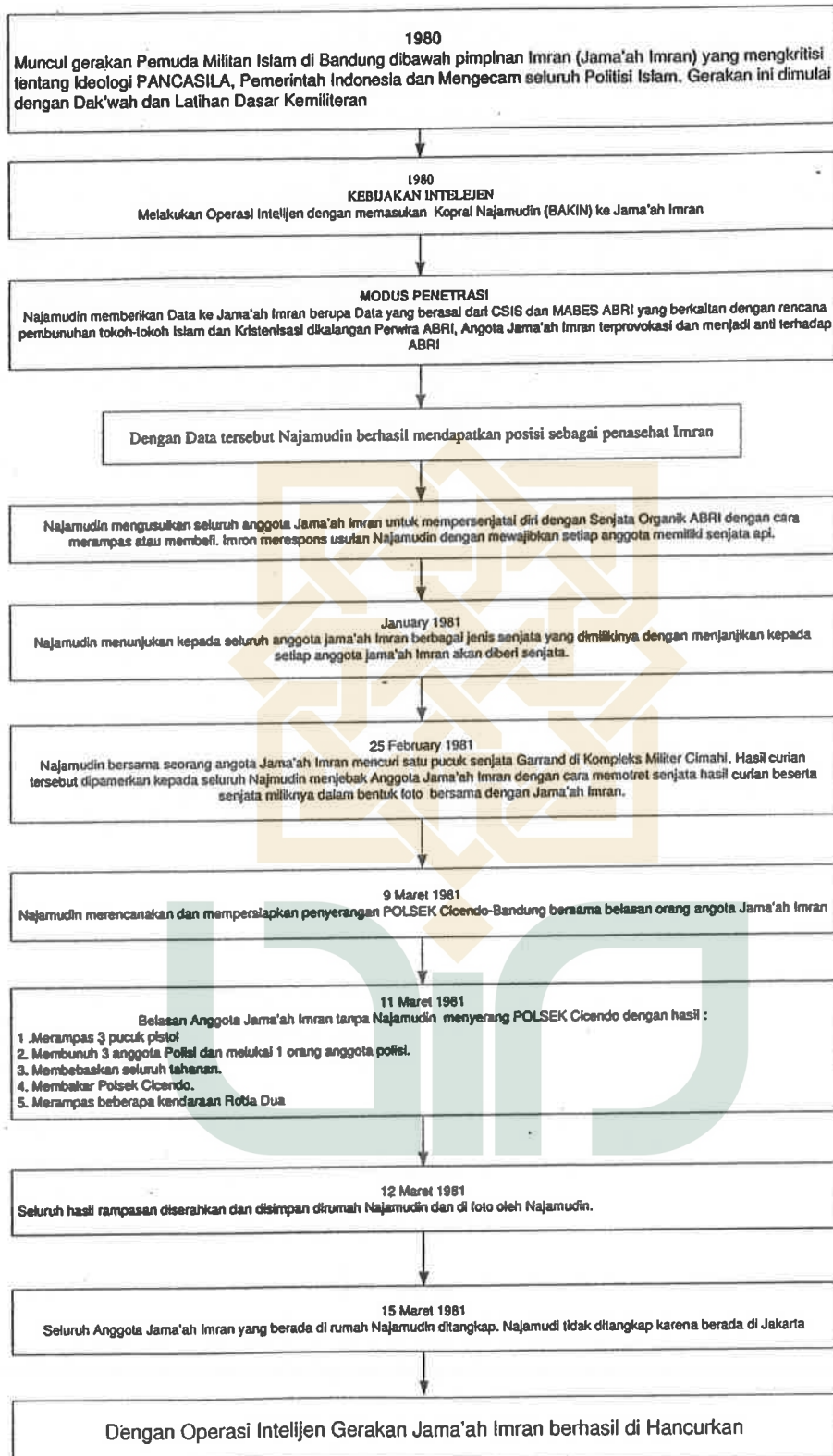
Mei 1999
ABDULAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BA'ASYIR kembali ke Indonesia

Agustus 1999
JAMAAH ISLAMIAH mengadakan Musyawarah Robithatul Mujahidin di Cisarua difasilitasi oleh Abu Jihad dan Abdul Haris.

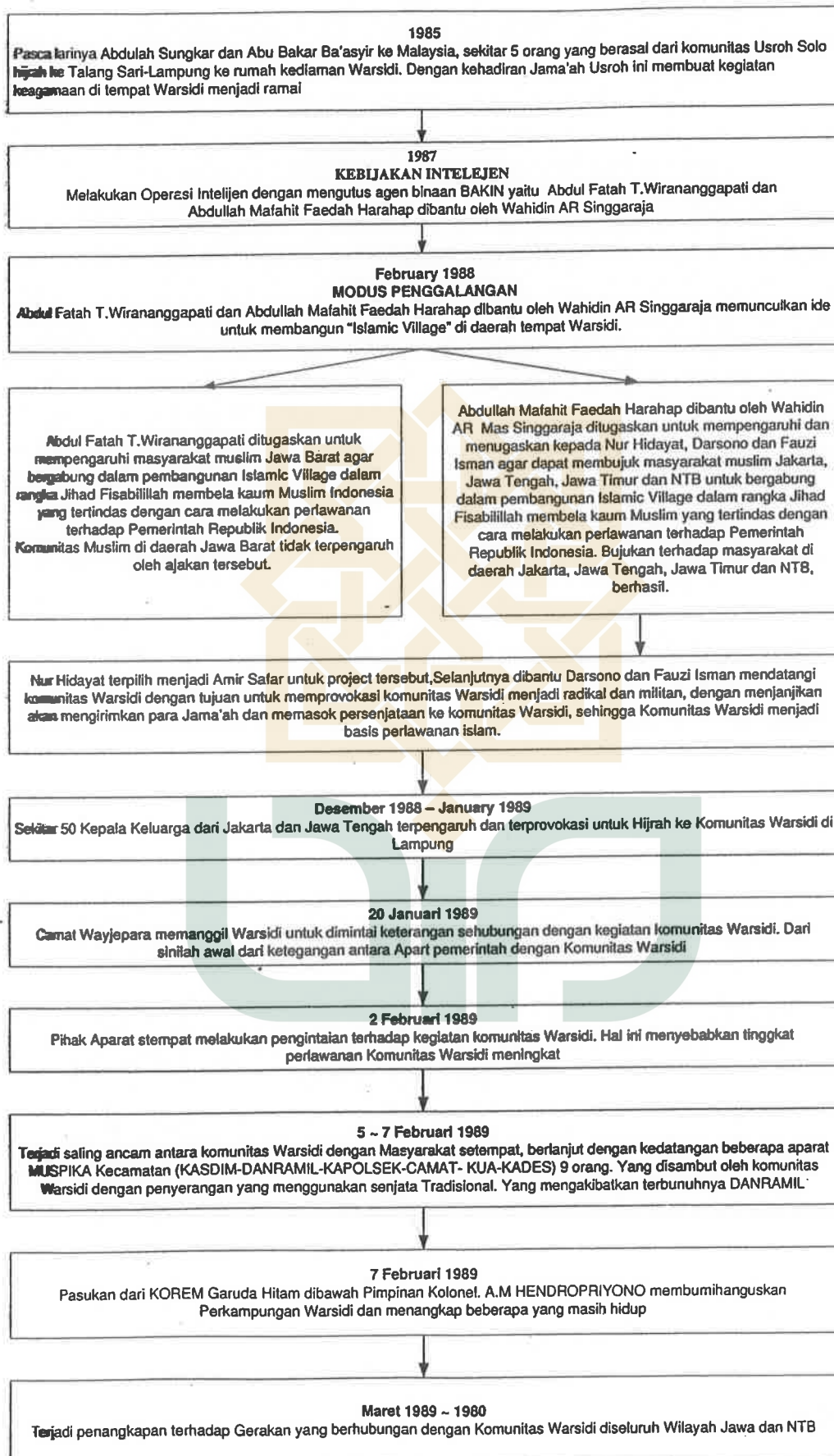
2000
JAMAAH ISLAMIAH mengadakan Musyawarah Robithatul Mujahidin di Malaysia yang difasilitasi oleh Abu Jihad dengan melalui HAMBALI

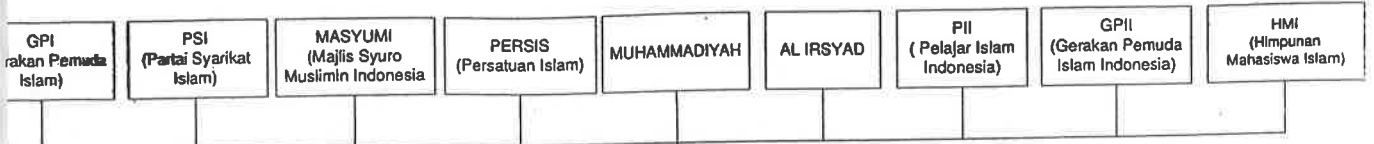


**POLA OPERASI INTELEJEN REZIME ORDE BARU
YANG DIGUNAKAN TERHADAP
JAMA'AH IMRAN**



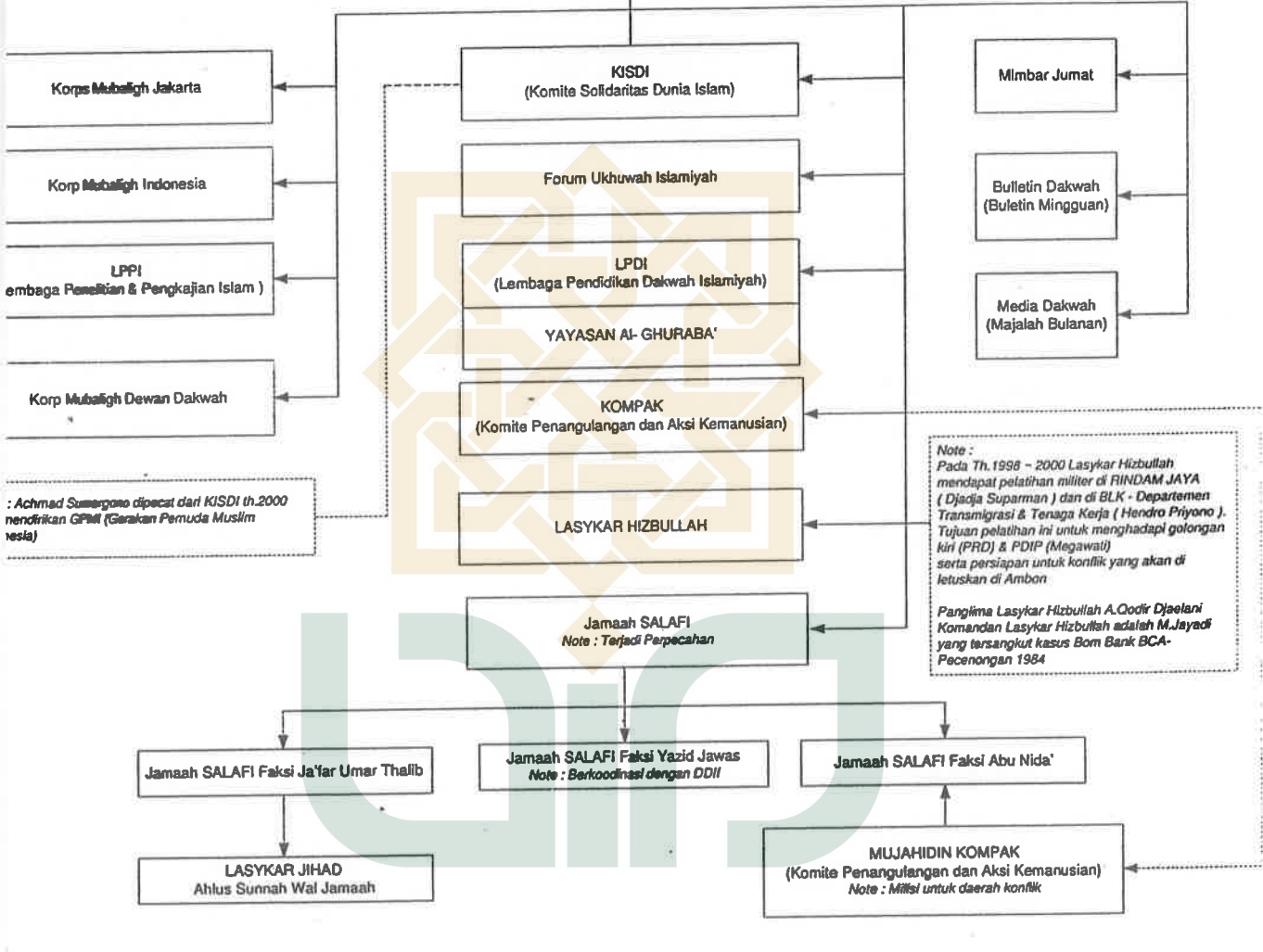
**POLA OPERASI INTELEJEN REZIME ORDE BARU
YANG DIGUNAKAN TERHADAP
KOMUNITAS WARSIDI DI TALANGSARI - LAMPUNG**



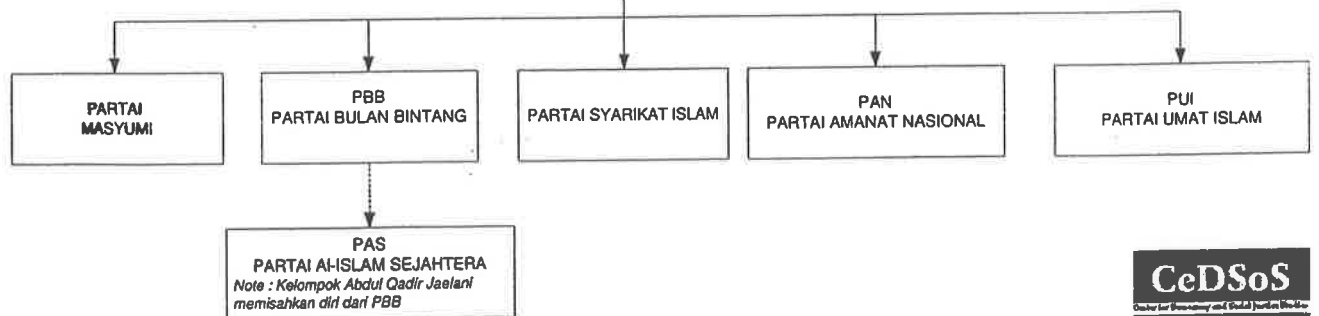


1967
DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH

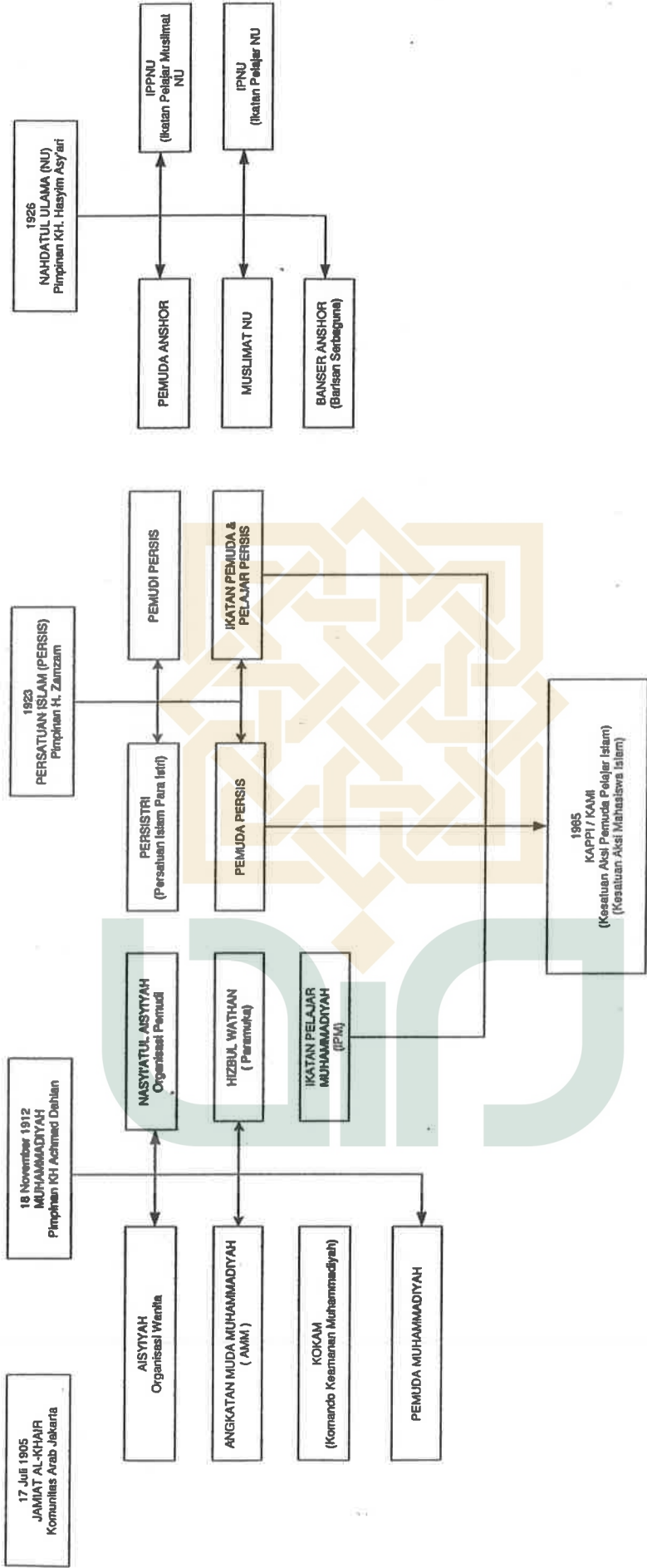
1. 1967 - Didirikan Oleh M.Natsir
2. Membawa misi Rabithah Alam Islami - Saudi arabia
3. Bergerak di Bidang Dakwah / Wakaf & Pembangunan Masjid
4. Menganteliasi Gerakan Kristen dan Aflran Sesat.
5. Merekomendasikan pelajar/mahasiswa untuk belajar ke Saudi Arabla



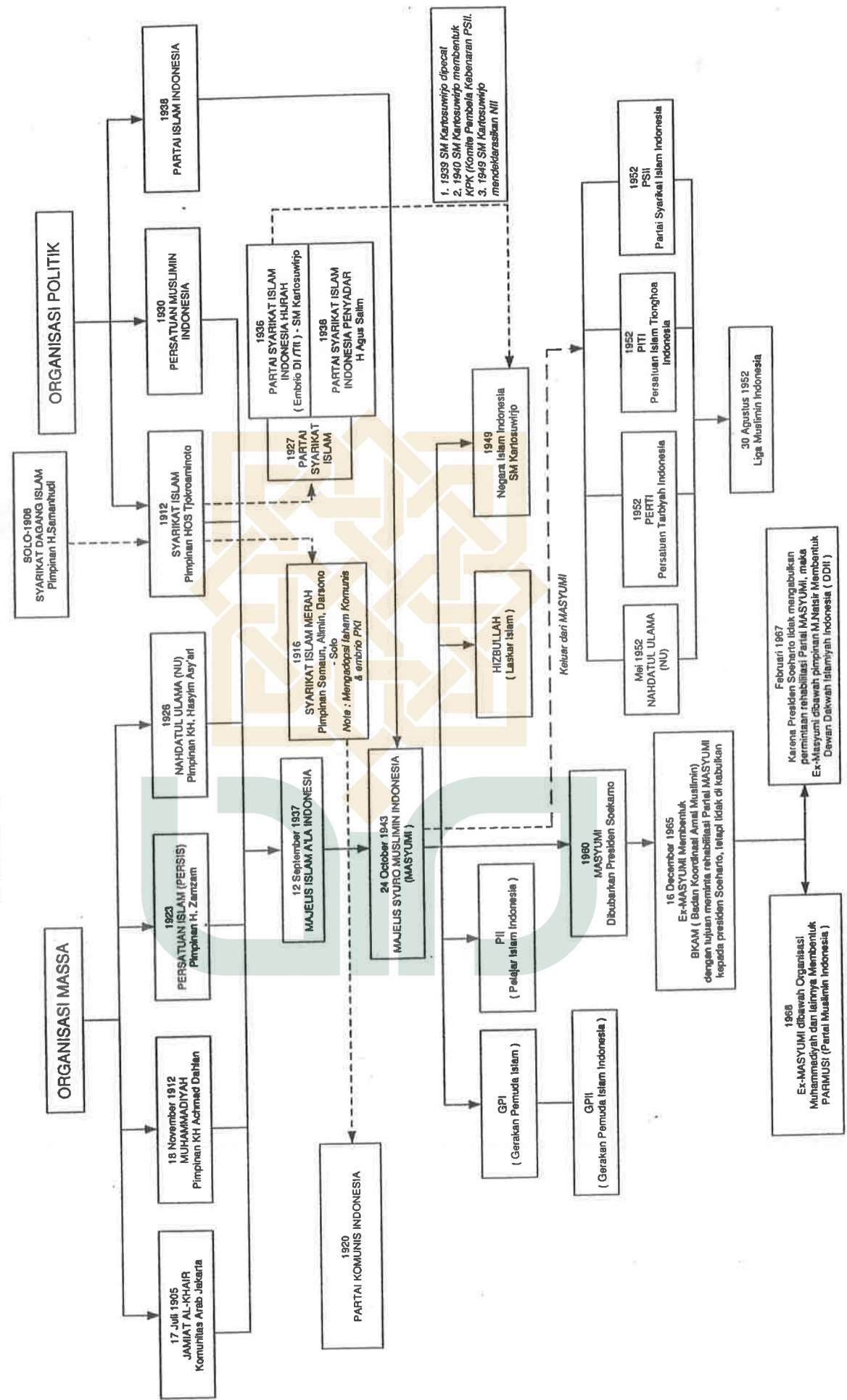
DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH
Note : Pasca Reformasi 1998



PETA SEJARAH ORGANISASI MASSA ISLAM Nasional

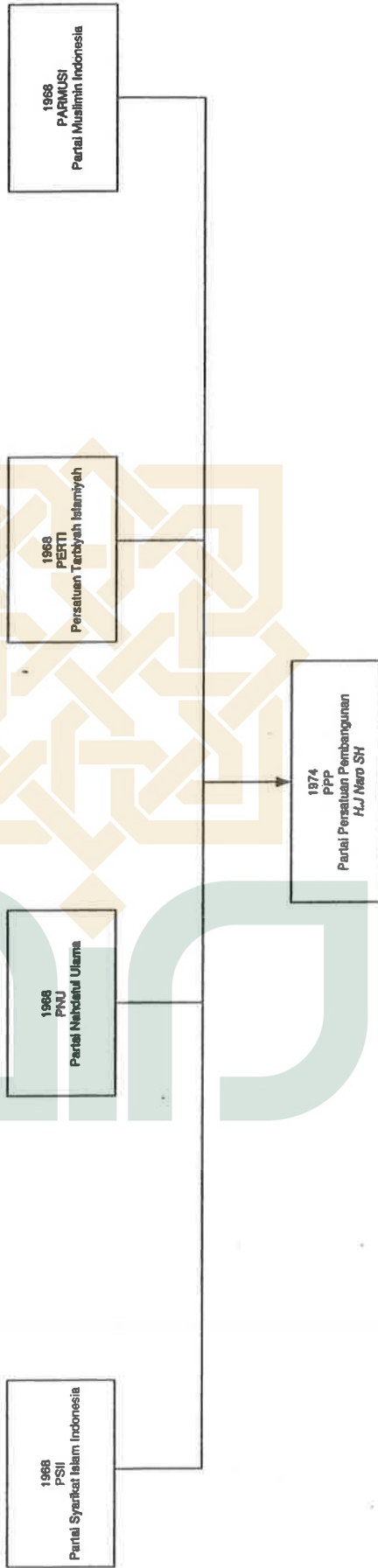


PETA SEJARAH ORGANISASI MASSA dan POLITIK Islam Nasional

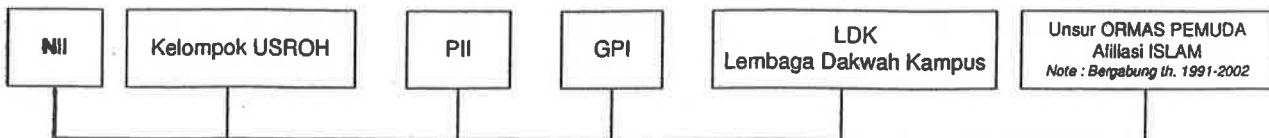


PETA SEJARAH
ORGANISASI POLITIK ISLAM Nasional
Rezime Orde Baru

Note:
1. Sejak 75, 1968 Elite Penguasa dibentuk Partai Islam harus di reat oleh Presiden Soeharto.
2. Semua Elite Partai Islam dibawah koordinasi Ail Moertopo.

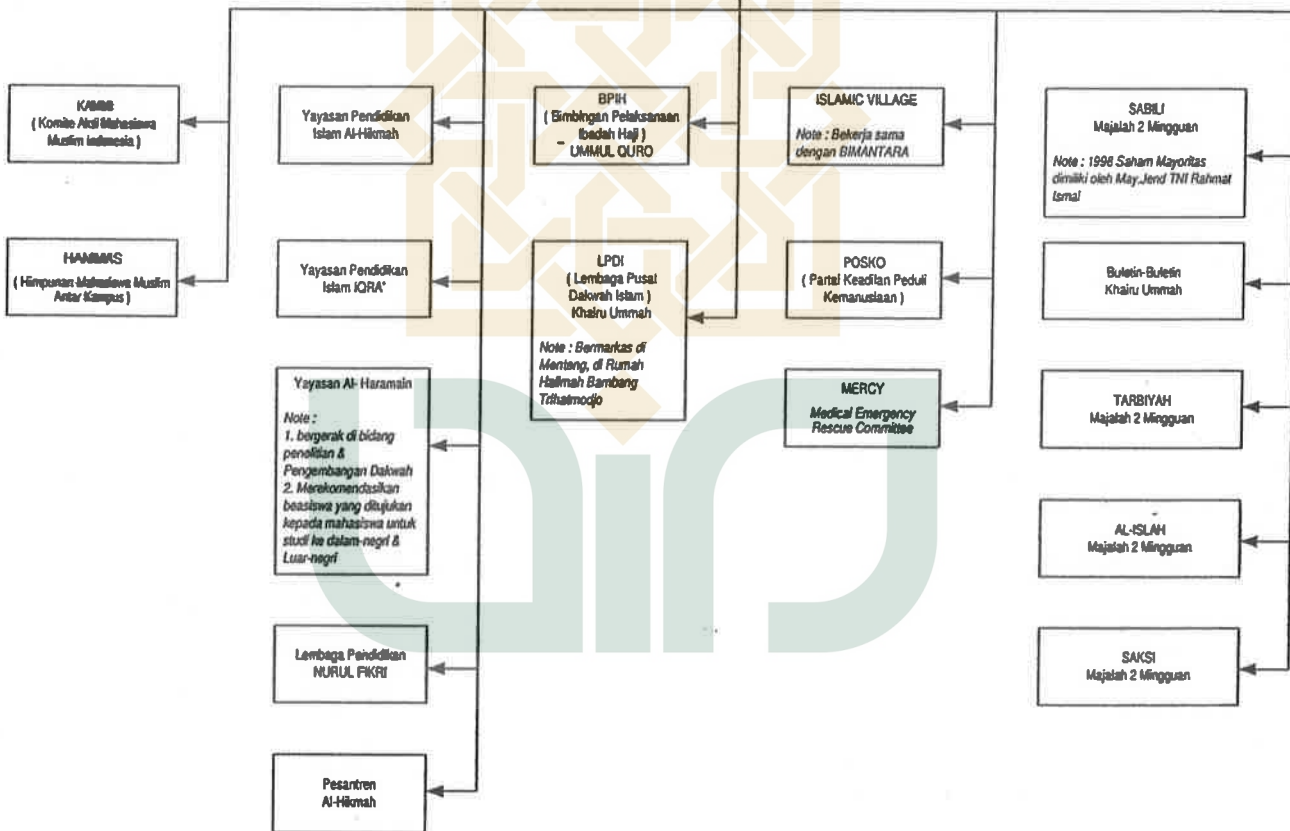


PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Note : 1998 Partai Keadilan



1985
Gerakan TARBİYAH - Ikhwan
 Pimpinan Helmi Aminudin bin Danu
Note : Gerakan Ini sejak awal disponsori oleh Soeripto (Deputi BAKIN)

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Note : Mengadopsi dan th. 1991 resmi sebagai Bagian dari organisasi Ikhwanul Muslimin - Mesir (Syech Saïd Hawwa)



Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Insan Kamil
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 00540196
Fak/Jur/Smt : Ushuluddin/Sosiologi Agama/XVI
Agama : Islam
Alamat di Yogyakarta : Jalan Timoho Gang Genjah No.586 Ngentak
Sapen Yogyakarta.
Alamat Asal : Dusun Selladan Desa Palasa Kec. Talango Kab.
Sumenep Madura Jawa Timur.
Pendidikan : SDN Kombang I lulus tahun 1991
MTs Matholi'ul Anwar lulus tahun 1995
MA Matholi'ul Anwar lulus tahun 1998
UITN Sunan Kalijaga lulus tahun 2007
Nama Orang Tua :
Nama Ayah : Mahwi
Nama Ibu : Kaflani (almarhum)
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Selladan Desa Palasa Kec. Talango Kab.
Sumenep